

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Alasan Provinsi Sumatera mencetak ORIPS karena perekonomian Indonesia di awal kemerdekaan sangat buruk akibat peninggalan dari penjajahan Jepang, yang diperparah dengan kedatangan tentara Sekutu dan NICA pada tanggal 4 Oktober 1945 di Tanjung Periok yang bertujuan untuk menguasai Indonesia kembali. Di awal kemerdekaan ada tiga mata uang yang beredar yaitu uang pendudukan Jepang atau Rupiah Jepang, Uang De Javasche Bank dan Uang NICA. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah RI membuat kebijakan dengan menerbitkan uang sendiri yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia yang bernama Oeang Republik Indonesia (ORI). ORI diterbitkan pada 30 Oktober 1946 melalui pidato Muhammad Hatta pada 29 Oktober 1946. ORI hadir untuk menolak peredaran uang Jepang, De Javasche Bank, dan uang Nica. Namun, dalam peredaran ORI mengalami banyak kendala akibat dari aksi polisionil, dan blokade Belanda, kemudian geografis Indonesia yang berpulau-pulau sehingga ORI tidak tersebar secara merata keseluruh daerah-daerah termasuk di Pulau Sumatera. Oleh karena itu, pemerintah mengambil langkah agar kebutuhan dan perekonomian tiap-tiap daerah tidak terhambat, maka melalui Peraturan Pemerintah No. 19/1947 tertanggal 26 Oktober 1947 Pemerintah Daerah tingkat Provinsi, Keresidenan, dan Kabupaten diberikan wewenang untuk menerbitkan Oeang Republik Indonesia Daerah (ORIDA). ORIDA adalah uang kertas

atau tanda pembayaran yang sah yang berlaku secara terbatas di daerah tersebut. ORIDA pertama di pulau Sumatera bernama ORIPS (Oeang Republik Indonesia Provinsi Sumatera).

2. Proses pencetakan ORIPS dilaksanakan di Percetakan Negara II (Percetakan Deli) yang sebelumnya telah dipindahkan dari Kota Medan ke Kota Pematang Siantar. ORIPS dicetak dengan menggunakan kertas HVS/kertas buku. ORIPS yang bertanggal 31 Maret 1947 itu baru dapat dicetak pada bulan April 1947, adapun jenis pecahan yang dicetak adalah pecahan 1 Rupiah, 5 Rupiah, 10 Rupiah, dan 100 Rupiah. ORIPS mulai diedarkan pada tanggal 11 April 1947 sebagai tanda pembayaran yang sah di Sumatera. Pengeluaran ORIPS diatur maklumat Gubernur Sumatera no. 92/K.O tertanggal 8 April 1947. Uang ORIPS yang akan di edarkan ke Daerah-daerah sebelumnya akan di beri cap stempel dan label sesuai dengan daerahnya masing-masing. ORIPS ditandatangani oleh R.A Herman (Direktoer Bank Negara Indonesia Pematang Siantar) dan R.M. Amin (Kepala Djabatan Keoeangan Propinsi Soematera). Untuk pengaman dari pemalsuan uang ORIPS emisi Pematang Siantar menggunakan Kode Kontrol. Pada Agresi Militer Belanda I pada tanggal 21 juli 1947 kota Pematang Siantar di serbu oleh Belanda. Akibatnya seluruh mesin pencetak ORIPS jatuh di tangan Belanda Sehingga Percetakan ORIPS terhenti. Pencetakan ORIPS selanjutnya dilaksanakan di Bukit Tinggi yang pada masa agresi militer Belanda I masih dalam keadaan aman serta menjadi pusat pemerintahan Provinsi Sumatera setelah Pematang Siantar di kuasai

Belanda. Gencarnya aksi polisionil yang dilancarkan oleh Belanda dalam Agresi menyebabkan hubungan antara daerah-daerah Republik di Sumatera dengan ibu kota Provinsi di Bukittinggi menjadi terputus, termasuk distribusi ORIPS. Percetakan ORIPS di Bukittinggi berakhir pada Agresi Militer Belanda II segala alat cetak dibumihanguskan oleh Belanda. Pada tahun 1949 pencetakan ORIPS dilanjutkan di daerah Muara Bungo Kota Jambi. Dengan didudukinya Muara Bungo oleh tentara Belanda pada tanggal 25 Mei 1949, percetakan ORIPS diungsikan ke Tanah Tumbuh dan kemudian dipindahkan ke Tanjung Belit, Rantau Ikil, 300 km dari kota Jambi. Jumlah pecahan yang dicetak awal adalah pecahan 25 dan 50 rupiah atas nama Dewan Menteri Keuangan Daerah Jambi Mr. Lukman Hakim. Kemudian Mr. Lukman Hakim menyerahkan klise ke percetakan di Rantau Ikil untuk mencetak pecahan 10, 25, 50, dan 100 rupiah. Jumlah uang yang beredar selama Percetakan ORIPS berjalan diperkirakan berjumlah Rp. 42.750.000,-.

3. Peran Oeang Republik Indonesia Provinsi Sumatera (ORIPS) dalam perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia yaitu Pencetakan ORIPS sangat banyak membantu masyarakat menolong perekonomian rakyat Sumatera, sebab masalah kesulitan keuangan sebagai alat pembayaran yang sah sudah dapat teratasi. Rakyat dengan semangat nasionalisme yang berkobar sangat antusias menyambut kehadiran ORIPS sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di daerah Sumatera. Seluruh masyarakat kota maupun desa dengan bangga menggunakan ORIPS dan dengan tegas

menolak memakai uang NICA sebagai alat pembayaran. ORIPS menjalankan perannya sebagai alat perjuangan karena dapat membiyai beraneka keperluan negara yang baru berdiri, seperti membiyai gaji pegawai antara lain polisi, tentara, dan menanggulangi perekonomian rakyat.

5.2 Saran

Berdasarkan pengalaman yang didapat peneliti selama penelitian mengenai Uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera (ORIPS) Dalam Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia Di Sumatera Pada Tahun 1947-1949. Saran saya sebagai penulis adalah diharapkan kepada Museum Uang Sumatera agar menambah koleksi tentang uang ORIDA di Sumatera, dan menambah literatur-literatur yang berkaitan dengan proses percetakan ORIDA di Sumatera. Saran saya untuk Numismatik yang mempunyai koleksi tentang uang ORIDA agar sebaiknya tidak menjual uang tersebut karena uang tersebut adalah bukti perjuangan menegakkan kedaulatan ekonomi pada masa kemerdekaan melawan bangsa asing.

Saran untuk kepentingan ilmiah, disarankan agar kiranya pemerintah bekerjasama dengan instansi-instansi lainya untuk menghimpun data-data tulisan terkait aktivitas percetakan ORIPS yang mungkin masih berada ditangan para bekas pejuang maupun instansi yang ada. Hal ini diharapkan dapat menjaga keutuhan dan kelestarian sumber karena mendapat perlakuan yang khusus di instansi kearsipan pemerintah.